

BAB V

HASIL & KESIMPULAN

Dengan data yang sudah ada, tahap selanjutnya adalah menyajikan data tersebut menjadi bentuk data kesimpulan yang lebih mudah dipahami. Didasarkan dari data yang disajikan dalam Badan Pusat Statistik, “*Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama*”. ialah sebagai berikut:

Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2017 - 2022						
Negara tujuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Nilai FOB : 000 000 US\$					
India	4,901.2	3,561.5	2,252.0	2,987.3	3,337.8	5,320.6
Tiongkok	2,651.8	2,637.6	3,019.7	2,867.5	4,825.9	3,991.1
Belanda	936.6	711.6	480.2	460.2	615.7	683.2
Amerika Serikat	938.7	756.8	658.6	784.5	1,816.8	2,222.2
Spanyol	930.0	718.7	572.0	757.4	996.8	667.6
Italia	708.2	544.8	410.2	626.6	622.7	659.2
Lainnya	5,725.7	5,857.6	5,451.6	6,703.8	11,050.0	10,515.6
Jumlah	20,340.9	17,898.8	15,574.4	18,444.0	28,606.0	29,628.1

Tabel Gambar 8. *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2022.*

Sumber: *Badan Pusat Statistik.*

Seperti yang terlihat pada **Tabel Gambar 8.**, setelah diberlakukannya kebijakan RED II oleh Uni Eropa pada tahun 2018, disertai bukti argumen mereka yang mana menyebutkan ‘komoditas CPO adalah komoditas yang merusak

lingkungan', membuat keadaan dimana banyak *Demand* CPO di pasar internasional mulai menurun sebagai akibatnya. Dengan hadirnya kebijakan RED II, negara-negara anggota Uni Eropa seperti Belanda, Spanyol, Italia mengalami penurunan *Demand* CPO yang sangat drastis. Ditambah lagi, dengan munculnya Pandemi Covid-19 yang menutup aktivitas pasar internasional pada 2019, membuat total nilai ekspor komoditas CPO Indonesia lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun demikian, Pandemi Covid-19 akhirnya pun mulai berakhir dan pasar internasional dapat kembali seperti beraktifitas seperti normal, ditambah lagi faktor bantuan dari berbagai kerjasama bilateral dengan India membuat keuntungan pada tahun 2020 mulai stabil. Kemudian datangnya 2021, dimana akumulasi surplus CPO mentah yang dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya membolehkan Indonesia melakukan ekspor CPO dengan volume yang cukup besar dibanding pada tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan dunia internasional yang tidak menentu mendorong aktor negara untuk melakukan segala cara untuk bertahan hidup, kerjasama merupakan salah bentuk dari usaha bertahan hidup negara dalam dunia internasional. Selain itu, keberlangsungan hidup yang berkelanjutan juga merupakan salah satu faktor yang tidak luput hilang dari topik pembicaraan studi hubungan internasional. Sementara itu, dibalik semua pemahaman tersebut, akan selalu ada usaha negara untuk memajukan kepentingannya sendiri.

Sehingga dalam merefleksikan simpulan tersebut dalam penelitian ini, dengan segala lika-liku permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dalam penelitian ini, Indonesia dapat bertahan hidup dari berbagai permasalahan internasional tersebut melalui pemanfaatan interaksi hubungan internasional dengan melakukan berbagai langkah-langkah kerjasama bilateral dengan mitra dagangnya terbesarnya yaitu India. Dalam keadaan ini, India juga tidak semata-mata membantu Indonesia dengan kebaikannya hati nurani. Tetapi keputusan untuk membantu tersebut, juga didasarkan pada kepentingan nasional India yang mana menghasilkan keadaan win-win melalui kesepakatan kerjasama bilateral.

Kerjasama bilateral Indonesia dan India sebagai topik utama dalam penelitian, menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, dimana keduanya selalu bersama-sama menciptakan keadaan lingkungan yang menguntungkan kedua pihak, dan melihat hasil dari kerjasama itu terwujud (berhasil mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi) benar-benar menjadi sesuatu yang mencerminkan dunia utopia yang dijunjung kaum liberalisme. Dimana negara dapat hidup damai dengan satu sama lain, tanpa adanya konflik dan menghasilkan keuntungan dari terjaganya kerjasama internasional.

Disamping itu, pertentangan yang dilakukan antara Indonesia dan Uni Eropa, tidak semata-mata luput dari kajian studi hubungan internasional. Yaitu dalam kasus Uni Eropa, kumpulan negara-negara tersebut berusaha untuk memajukan aspek keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Sebab poin-poin yang tercantum dalam SDGs sangat penting demi keberlangsungan hidup generasi penerus. Sehingga dengan negara mewujudkan nilai-nilai SDGs, negara tidak

hanya terfokus pada ngejaran pengembangan kemajuan saat ini, tetapi juga pengembangan kemajuan yang dimaksudkan sebagai bagian dari investasi pengembangan dimasa depan.

Pembatasan yang dilakukan Uni Eropa terhadap negara mitra dagangnya, semata-mata sebagai cerminan agar negara-negara produsen komoditas CPO (seperti Indonesia) untuk lebih memikirkan pada pengelolaan yang menghormati dan menjunjung nilai-nilai SDGs dalam melakukan segala bentuk pengembangan (terutama yang menyangkut kesejahteraan ekonomi), sehingga hal tersebut dapat menjadi perwujudan kontribusi perkembangan ekonomi yang baik.

Sementara itu, pembatasan yang dilakukan Uni Eropa kepada negara anggotanya sendiri, juga bermaksud untuk mendorong perkembangan industri di negara-negara Uni Eropa untuk dapat memiliki peran aktif dalam ekspor perdagangan komoditas *Biodiesel* berbasis minyak nabati dari hasil sektor pertanian negara sendirinya. Berdasarkan pandangan merkantilisme, apa yang dilakukan Uni Eropa ini sangatlah mencerminkan teori tersebut. Yaitu negara-negara Uni Eropa berusaha membatasi import komoditas yang didapatkan, dan berusaha mendorong eksport dalam negeri ke dalam pasar internasional. Sehingga negara-negara Uni Eropa tidak menciptakan rasa dependensi terhadap negara-negara produsen *Biodiesel* berbasis CPO, dan negara anggotanya dapat berdiri sendiri membangun ekonominya sesuai dengan pemikiran dari teori merkantilisme.

Selain itu adapula catatan peneliti yang menjelaskan bahwa pandangan Adam Smith mengenai kekurangan dari teori merkantilisme yang mengatakan dengan suatu negara menutup pasar (atau usaha pemerintah mengatur pasar) hal tersebut dapat menghasilkan ketidak efisienan pada kinerja pasar itu sendiri. Yakni, sebagai pembuktian pandangan Adam Smith tersebut dalam kasus pembatasan yang dilakukan Uni Eropa, adalah pendapat yang dijelaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko, yang mana beliau menegaskan bahwa Uni Eropa sebenarnya sangat membutuhkan kelapa sawit Indonesia.⁷²

Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa sebesar 26 persen pada tahun 2020, seperti yang ditunjukkan pada **Tabel Gambar 8**. Selain itu, Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Achmad Maulizal Sutawijaya, juga menyatakan bahwa sekitar 60 persen produk CPO Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor. Artinya, Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap ketersediaan barang konsumsi, pangan, dan energi untuk dunia.⁷³

Selain itu adapula perkiraan bahwa populasi global akan mencapai sekitar 9,8 miliar pada tahun 2050, dengan peningkatan kepadatan penduduk di perkotaan, memprediksi bahwa akan ada kebutuhan tambahan sekitar 200 juta ton minyak nabati di masa depan. Dalam hal ini, CPO dianggap sebagai pilihan yang efisien dan produktif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. CPO dikenal sebagai salah satu bentuk minyak nabati yang memiliki produktivitas lebih tinggi dalam

⁷² KSP News. (2021). "Moeldoko : Uni Eropa Masih Butuh Kelapa Sawit Indonesia".

⁷³ Gunawan, I. (2023). "Eropa Masih Butuh Sawit Indonesia Meski Ada UU Anti Deforestasi".

penghasilan minyak per hektar tanah yang ditanami kelapa sawit. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan pembatasan yang dilakukan negara-negara Uni Eropa pada dasarnya melukai perkembangan ekonomi negaranya sendiri, sebab *Demand* pada komoditas biodiesel akan kian meningkat dan negara-negara Uni Eropa tidak bisa memenuhi *Demand* tersebut akibat pembatasan yang dilakukan Uni Eropa.

